



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

UPT PUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH (P3I)

KAMPUS I : Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo 61215 Telp. 0318945444, 8928097 Faks. 8949333

website : www.umsida.ac.id

email : p3i@umsida.ac.id

Nomor : E.6/40/33.00/KET/IV/2018
Perihal : Surat Keterangan Tidak Plagiat
Lampiran : -

Kepada Yth.

Bapak Hazim
Di

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya permohonan Surat Keterangan Tidak Plagiat untuk:
artikel berjudul :

1. Dampak Sosial Dan Psikososial Bagi Pengungsi Pasca Konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang Madura
2. Komodifikasi Pendidikan dan Hilangnya Nalar Kritis Masyarakat
3. Membangun Karakter Anak Jalanan berbasis Partisipasi Masyarakat
4. Penanggulangan Korupsi Berbasis Partisipasi Masyarakat pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo

dengan penulis Hazim, maka, dengan ini Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I) UMSIDA menyatakan artikel tersebut tidak plagiat dan telah mengikuti kaidah penulisan sesuai Committee on Publication Ethics (COPE) berdasarkan hasil cek plagiasi (Turnitin). Artikel yang bersangkutan digunakan untuk keperluan pengajuan jabatan fungsional akademik dosen.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, mohon untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Warek I
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.

Sidoarjo, 30 April 2018
Ka. Sie Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I)
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

M. Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

korupsi

by Hazim 4

Submission date: 10-Apr-2018 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 944155975

File name: PENANGGULANGAN_KORUPSI_BERBASIS_PARTISIPASI_MASYARAKAT.docx (164.8K)

Word count: 4552

Character count: 32117

PENANGGULANGAN KORUPSI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Hazim

Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Majapahit 666 B Sidoarjo, Telp. 8945444, Fax. 031-8949333
Email: mizakh@yahoo.com

ABSTRACT

A prevention of corruption in Indonesia through structural approach has been examined by many scholars. The gap is, there is not found a study related to this issue focusing on cultural approach. For this reason, this study is concentrated on the public participation in order to prevent the corruption which focuses on the Urban Poverty Projects (PNPM Mandiri Perkotaan) in Sidoarjo, East Java, as a case study. The research questions are: a) to what extend the community base participant impacts the reduce corruptions?; b) what are the modes of public participation in order to prevent the corruptions?. The aim of this study investigates the mode of community participations in order to minimize the corruption. A descriptive qualitative approach was used to collect the data which used three main methods: a) observation concentrated at two sub-districts, Taman and Sidoarjo; b) interview conducted for getting valuable information from the program executors and beneficiaries of "PNPM Mandiri Perkotaan" as well; c) a study of documents related to the program such as the standart operational procedures (SOPs) as well as proposal and report documents. Some theoretical framewoks of participations have been used to analyse the data. The results of this study can be seen that there are three stages of public participation in order to prevent the corruption: the first is the plan stage. Generally, public still need to be forced to participate at this step. However public have showed significant participations through thought and physical participation with skills. The second is the implementation stage. Public have been able to do self-mobilization participation including physical, psychological participation and participation with skills at this step. Moreover, they also have contributed significantly through financial participation instead of getting income from their involments. However, in the last step called monitoring and evaluation, they generally need to be encouraged by external factors to participate in this stage. Regularly meeting is a part of their participation in order to evaluate their projects.

Key words: *Participation, Corruption, PNPM Mandiri Perkotaan.*

ABSTRAK

Studi tentang pencegahan korupsi melalui pendekatan struktural di Indonesia telah banyak dikaji oleh banyak ahli. Aspek yang masih gap adalah kajian terkait dengan isu ini yang menggunakan pendekatan kultural. Atas dasar itu, studi ini dikonsentrasikan pada studi kasus partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi yang difokuskan pada proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) di Sidoarjo Jawa Timur. Rumusan masalahnya adalah: a) sejauh mana peran serta masyarakat dapat memberikan dampak bagi penurunan tindakan korupsi? b). bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka menanggulangi korupsi. berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi model-model partisipasi masyarakat dalam meminimalisir tindakan korupsi. Untuk melakukan penggalian data, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan tiga metode utama; observasi yang dikonsentrasikan di dua (2) kecamatan yaitu Taman dan Sidoarjo; b) interviws dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bernilai dari pata pelaksana dan penerima manfaat program; c) studi dokumen terkait dengan proyek dilakukan untuk memperkuat hasil yang diperoleh, diantaranya dari dokumen SOP, Proposal dan laporan kegiatan. Beberapa kerangka teori telah digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Hasil dari studi ini dapat diklasifikasikan dalam tiga tahapan. Pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, umumnya masyarakat masih membutuhkan pemaksaan agar bisa berpartisipasi. Meski demikian, public telah menunjukkan partisipasinya secara signifikan melalui pemikiran, dan aktif dalam kegiatan fisik maupun yang membutuhkan skill tertentu. Kedua adalah tahap pelaksanaan. Masyarakat telah mampu memobilisasi dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik maupun skill tertentu. Lebih dari itu mereka juga telah berkontribusi secara signifikan dalam bentuk finansial walaupun tidak mendapatkan upah dari proyek. Meski demikian, pada tahap terakhir yang disebut dengan tahap monitoring dan evaluasi, mereka pada umumnya masih membutuhkan motivasi dari eksternal untuk bisa terlibat aktif. Pertemuan secara rutin adalah salah satu bentuk partisipasi untuk mengevaluasi proyek mereka.

Kata kunci: *Partisipasi Masyarakat, Korupsi, PNPM Mandiri Perkotaan.*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan berat bagi Bangsa Indonesia. Hasil Survei yang dilansir tanggal 13 Juni 2011 di Washington DC oleh The World Justice Project (V¹³) menempatkan Indonesia pada posisi ke-47 dari 66 negara terkorup secara global. Sementara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ke-12 dari 13 negara. (Haluan Kepri: 2011).

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pembangunan di Indonesia yang memiliki dua strategi penanggulangan korupsi secara sekaligus. Pertama, secara struktural pada tingkat Pusat melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Instansi Penanggungjawab program; kedua melibatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima mamfaat program dan juga sebagai satuan pelaksana sub proyek/kegiatan. (DPU: 2007). Strategi penanggulangan korupsi kedua yang merupakan pendekatan kultural berbasis partisipasi masyarakat ini menarik dilakukan kajian.

Atas dasar itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam sehingga diharapkan bisa mendeskripsikan tentang model partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan korupsi pada PNPM Mandiri Perkotaan di Sidoarjo.

Untuk menganalisis data, menggunakan beberapa pendekatan te²⁰ partisipasi. Mikkelsen (2006), membagi dua pendekatan dalam hal partisipasi, yaitu: (1) partisipasi datang dari inisiatif masyarakat sendiri, merupakan tujuan dalam proses demokrasi. (2) partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Tingkat ¹⁸ partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) dapat ditunjukkan oleh terjadinya pembagian kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok masyarakat penerima kegiatan. Adapun tingkatannya secara berurutan adalah: *Manipulation; Therapy; Informing; Consultation; Placation; Partnership; Delegated power; Citizen control*. Dua tangga pertama (*Manipulation; Therapy*) dikategorikan sebagai *Nonparticipation*, Tiga tangga berikut (*Informing; Consultation; Placation*) disebut sebagai *Tokenism*, yaitu

bentuk partisipasi didasarkan atas dorongan. Sedangkan Tiga tangga terakhir (*Partnership; Delegated power; Citizen control*) dikategorikan sebagai *Citizen Power*. Dan ini merupakan bentuk partisipasi yang sesungguhnya, karena masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Pretty (¹⁶) mengklasifikasikan partisipasi menjadi tujuh: *Passive Participation; Participation in information giving; Participation by consultation; Participation for material benefits; Functional participation; Interactive participation; Self-mobilisation*. Sedangkan Keit Davis (1995) membagi bentuk partisipasi dalam beberapa jenis: *psychological participation; physical Participation; physical and psychological participation; participation with skill; material participation; money participation*.

Beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan topik⁸ adalah: 1) Melly Septiani (2010), Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan, "Studi kas⁷ di Tlogomas Lowokwaru Kota Malang". Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat berada pada tingkat *placation* untuk indikator prakarsa, *informing* untuk indikator pembiayaan, *delegated power* untuk indikator pengambilan keputusan, *citizen power* untuk indikator kemampuan memobilisasi tenaga dan *partnership* untuk indikator kemampuan menyelesaikan masalah. 2) Yoni Yulianti (2010), Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri ⁸arkotaan di Kota Solok. Hasil penelitian, partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran berupa usulan, saran maupun kritik. Sumbangan tenaga diberikan dengan frekuensi terbanyak yaitu 52,7 %. Selain itu juga ada dalam bentuk material dan u¹⁵. 3) Faizal Saleh Muhammad (2006), Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang B¹⁵ dan Bersih. Hasil penelitian, terdapat tiga konsep partisipasi masyarakat. partisipasi politik, partisipasi social dan partisipasi warga.

Penelitian ini difokuskan pada partipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi pada ⁵NPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian adalah PNPB Mandiri Perkotaan di Sidoarjo yang difokuskan pada kawasan urban. Klasifikasi kawasan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik partisipasi masyarakat secara spesifik untuk kategori masyarakat heterogen. Fokus penelitian di dua Kecamatan, Kecamatan Sidoarjo (Kelurahan Cemengkalang, Bluru Kidul) dan Kecamatan Taman (Desa Wage, Desa Kedungturi).

Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data skunder. Jenis data primer diperoleh secara langsung dari sumber melalui: Pertama, wawancara secara bebas terpimpin kepada pelaku PNPB Mandiri Perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan; Penerima manfaat, Relawan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pimpinan Kolektif BKM, Kepala Desa, fasilitator; Kedua, observasi secara nonpartisipan, yang dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan PNPB Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi tiga kegiatan utama, yaitu; infrastruktur (lingkungan), sosial dan ekonomi; Ketiga, Studi Dokumen yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum PNPB Mandiri Perkotaan di Sidoarjo, antara lain diperoleh dari; dokumen pencairan, dokumen pemanfaatan, Proposal pelaksanaan kegiatan, pelaporan dana kegiatan serta dokumen lain yang mendukung.

Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Melalui analisis data penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi pada PNPB Mandiri Perkotaan di Sidoarjo. Gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji dan disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Adapun langkah- langkah teknik analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

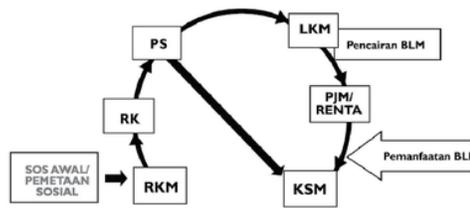
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan korupsi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo, bisa dilihat dari beberapa rangkaian. Slamet (1993) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan: Tahap pengambilan keputusan (perencanaan), yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat; Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan; Tahap monitoring dan evaluasi, partisipasi masyarakat pada tahap ini sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

a. Partisipasi saat Perencanaan.

Perencanaan merupakan pondasi awal untuk melakukan pengendalian dalam pengambilan keputusan agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. PNPB Mandiri Perkotaan memberikan perhatian yang ketat pada tahapan ini. Usulan kegiatan yang akan mendapatkan alokasi pendanaan dilakukan perencanaan dengan tahapan yang sangat detail dan mensyaratkan partisipasi masyarakat di mulai dari tingkat terendah (RT/RW). Tahapannya meliputi: Sosialisasi dan rebug kesiapan masyarakat (Soswal-RKM); Refleksi Kemiskinan (RK); Pemetaan swadaya (PS); Pembangunan Kelembagaan Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis); penetapan dalam Rencana Tahunan (Renta) hingga penentuan dalam prioritas usulan kegiatan. (Dep. PU, 2007). Lebih detail mengenai alur perencanaannya, dapat dilihat dari bagan berikut:

Gambar 1
Alur Perencanaan dalam PNPB
Mandiri Perkotaan.



Sumber : Pedoman PNPMP MP 2010

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik partisipasi masyarakat pada saat perencanaan di PNPMP Mandiri Perkotaan Sidoarjo secara umum, jika pendekatan Mikkelsen (2006), digunakan, maka partisipasinya bersifat memaksa. Jika menggunakan teorinya Pretty, masuk tipologi partisipasi Konsultasi. Artinya Masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi dengan pihak luar yakni tim Konsultan yang mengawal perjalanan perencanaan program. Mereka bergerak atas bimbingan dan dorongan dari Fasilitator pendamping di masing-masing kelurahan/Desa.

Tabel 1
Tipologi dan karakteristik Partisipasi

Tipology	Characteristic
Passive Participation	People participate by being told what is going to happen or has already happened. It is a unilateral announcement by an administration or project management without any listening to people's responses.
Participation in information giving	The information being shared belongs only to external professionals. People participate by answering questions posed by extractive researchers using questionnaire surveys or such similar approaches. People do not have the opportunity to influence proceedings, as findings of the research are neither shared nor checked for accuracy.
Participation by consultation	People participate by being consulted, and external agents listen to views. These external agents define both problems and solutions, and may modify these in the light of people's responses. Such a consultative process does not concede any share in decision making, and professionals are under no obligation to take on board people's views.
Participation for material benefits	People participate by providing resources such as labour, in return for food, cash or other material incentives. Much on farm

	research falls in this category, as farmers provide the fields but are not involved in experimentation or the process of learning. It is very common to see this called participation yet people have no stake in prolonging activities when incentives end.
Functional participation	People participate by forming groups to meet predetermined objectives related to the project, which can involve the development or promotion of externally initiated social organisation. Such involvement tends not to be at early stages of project cycles or planning, but rather after major decisions have already been made. These institutions tend to be dependent on external initiators and facilitators, but may become self-dependent.
Interactive participation	People participate in joint analysis, which leads to action plans and the formation of new social institutions or the strengthening of existing ones. It tends to involve interdisciplinary methodologies that seek multiple objectives and make use of systematic and structured learning processes. These groups take control/ownership over local decisions, and so people have a stake in maintaining structures or practices.
Self-mobilisation	People participate by taking initiatives independent of external institutions to change systems. Such self-initiated mobilisation and collective action may or may not challenge existing inequitable distributions of wealth and power.

Sumber: Pretty (1995)

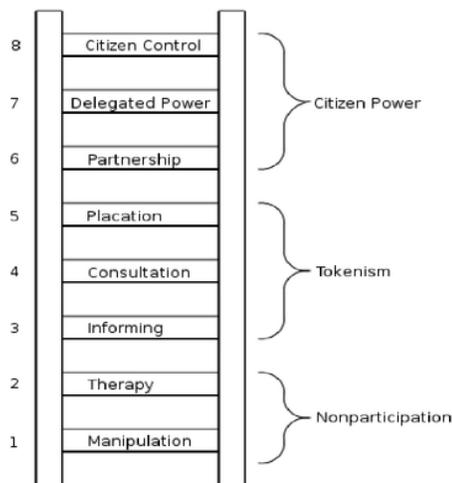
Adapun bentuk partisipasinya, merujuk pada Keit Davis dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- 1) Partisipasi berupa pikiran (psychological participation). Wujudnya adalah dengan mengikuti serangkaian tahapan rembug mulai dari Soswal-RKM, RK, PS, Pembangunan Kelembagaan BKM dan penyusunan PJM baik ditingkat basis maupun Desa.
- 2) Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran (physical and psychological participation). Untuk kategori ini, selain mereka secara aktif ikut dalam rangkaian perencanaan, mereka juga berpartisipasi untuk memobilisasi partisipan lain dengan memberikan undangan dan lain-lain. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam bentuk demikian tidak banyak, tetapi biasanya mereka akan menjadi tokoh kunci perjalanan PNPMP Mandiri Perkotaan di

Desa/ Kelurahan tersebut. Mereka ini biasanya masuk kategori relawan.

- 3) Partisipasi dalam bentuk barang (*material participation*), partisipasi dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Antara lain meminjamkan laptop, computer, memberikan konsumsi kegiatan, dan lain-lain untuk menunjang kelancaran kegiatan.

Dilihat relasinya dengan Pemerintah, model partisipasi masyarakat pada perencanaan ini apabila dipotret dengan teori partisipasi Arstein, mencapai level ke enam, yaitu *Kemitraan (partnership)*. Karena pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Ada pembagian kerja antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Di dalam sistem PNPM Mandiri Perkotaan, semua perencanaan diberikan kesempatan pada masyarakat dengan didampingi oleh fasilitator, sementara Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi untuk kelancaran proses. Berikut ini adalah anak tangga partisipasi menurut Arnstein.



Sumber: Arstein: 1969.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan dana untuk membiayai kegiatan berdasarkan alokasi yang sudah direncanakan, baik kegiatan yang bersifat Lingkungan, ekonomi maupun sosial. Pelaksanaan kegiatan di PNPM Mandiri Perkotaan adalah masyarakat sendiri yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kelompok ini bertanggung jawab untuk menyusun usulan kegiatan; Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan/pembangunan yang diusulkan; mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan keuangan yang didanai kepada BKM dan juga ke masyarakat di wilayahnya. (Dep. PU, 2010).

Agar masyarakat melalui KSM bisa mendapatkan kucuran dana PNPM Mandiri Perkotaan melalui BKM harus memenuhi prosedur: KSM telah mendaftar ke BKM dan dinyatakan layak; Adanya usulan kegiatan (proposal) oleh KSM; Usulan dari KSM telah masuk pada prioritas kegiatan atau Rencana Penggunaan Dana (RPD) BKM; Apabila kegiatan bersifat infrastruktur, sebelum memanfaatkan dana, dilakukan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K) difasilitasi oleh BKM; Proses pencairan dana dilakukan secara langsung 100% untuk KSM ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk kegiatan lingkungan dilakukan secara bertahap 30%, 60%, 10%. (Dep. PU 2010). Tahapan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian di masyarakat. Pelimpahan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat secara langsung merupakan salah satu bentuk penanggulangan korupsi. Karena masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola pendanaan dan kegiatannya sendiri. Apalagi sistem pembiayaan, menyangkut adanya swadaya dan jaminan bahwa biaya pengerjaan kegiatan lebih murah 25% dari harga umum.

Bentuk partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan, bisa dilihat dari dua hal: secara administratif, meliputi proposal kegiatan dan laporan kegiatan; dan secara pekerjaan, meliputi serangkaian aktifitas pelaksanaan kegiatan secara langsung sesuai dengan jenis kegiatannya. Secara

administratif, temuan di lapangan menunjukkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan PNPM; pertama, KSM merupakan penunjukkan dari BKM untuk syarat pencairan, bukan atas inisiatif dari masyarakat; Kedua, KSM tidak mengerjakan administrasi tapi dihendel oleh BKM. Hal ini terjadi di beberapa KSM. Menurut sejumlah pengurus BKM, sulitnya administrasi menjadi alasan bagi KSM untuk tidak mengerjakan, sehingga mereka harus menyerahkan ke BKM untuk mengerjakannya. Melihat kondisi partisipasi ini, bila dilihat menurut Pretty, termasuk kategorisasi partisipasi pasif, sedangkan bila dipotret berdasarkan tingkatan partisipasi menurut Arstein, partisipasi masyarakat (KSM) berada pada tingkatan manipulation, artinya belum ada partisipasi masyarakat (nonparticipation).

Apabila dilihat dari sisi pelaksanaan pekerjaan, terutama dalam kegiatan infrastruktur, ¹⁰ tipologi partisipasi mobilisasi swadaya. Masyarakat berpartisipasi dengan ¹⁰ a mengambil inisiatif dan tidak terikat dalam menentukan masa depan, di mana pihak luar hanya diminta bantuan dan nasihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Tingkatan partisipasi pada level *delegated power*. Sedangkan bentuk partisipasinya (Davis), dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis:

- Partisipasi yang berupa tenaga (physical Participation); Realisasi dari partisipasi ini adalah masyarakat terlibat langsung dalam pekerjaan tanpa mendapatkan imbalan. Biasanya bersifat gotong royong untuk melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan skill khusus, pada waktu-waktu tertentu; malam hari atau hari libur.
- Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran (physical and psychological participation). Partisipan dalam kategori ini biasanya mereka yang menjadi pengurus inti dari KSM. Mereka bertanggung jawab untuk memikirkan teknis pelaksanaan dan sekaligus berkontribusi tenaga. Biasanya hanya terbatas pada beberapa orang saja di kepengurusan KSM. Mereka bekerja

dengan didasarkan atas komitmennya membangun masyarakat, meskipun harus rela tersita waktu, pikiran dan juga tenaga walaupun tanpa mendapatkan imbalan yang bersifat materi. Bahkan sekali waktu harus meninggalkan kerjaan pribadinya untuk menyelesaikan tanggungjawabnya di KSM.

- Partisipasi yang berupa barang (material participation); Partisipasi yang demikian biasanya dibebankan pada kelompok masyarakat penerima manfaat langsung dan berdomisili di sekitar area kegiatan/pembangunan. Bentuknya antara lain berupa konsumsi; peralatan kerja; material dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan.
- Partisipasi yang berupa uang (money participation); partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada kegiatan. PNPM Mandiri Perkotaan ada ketentuan bahwa setiap pekerjaan lingkungan, harus ada swadaya masyarakat yang nilainya 25% dari total bantuan.

c. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif.

Sistem Monitoring dan evaluasi kegiatan di PNPM MP dilakukan sangat ketat dengan cara berjenjang dan partisipatif untuk menjamin kualitas serta mengantisipasi penyimpangan di masyarakat. Rangkaian pengendaliannya adalah; Monitoring internal KSM; Evaluasi keuangan Bulanan BKM; Evaluasi kegiatan di tingkat KSM/basis; Evaluasi BLM pertermin di tingkat BKM, Review partisipatif; Evaluasi melalui forum Rembug Warga Tahunan (RWT); Audit Independen masyarakat. (Dep. PU 2010).

- Monitoring Internal KSM dan UP BKM.

Sebagai upaya antisipasi dari segala penyimpangan, dibentuk sistem pengawasan internal di tubuh organisasi KSM yang disebut tim monitoring dan evaluasi partisipatif. Tim ini menjadi bagian yang melekat dalam struktur organisasi KSM. Mereka bertanggung jawab melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan, baik dalam hal pekerjaan maupun penggunaan dana. Selain itu, ada pengawasan dari Unit Pengelola (UP) yang

merupakan perangkat BKM untuk ditugaskan secara khusus melakukan pengendalian KSM.

Praktiknya, pengawasan internal ini belum berjalan efektif. Di sejumlah tim monev KSM, mereka hanya dicantumkan nama sebagai syarat tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Sementara Unit Pengelola (UP) BKM yang seharusnya menjadi pengawas lapis kedua, mereka justru berfungsi sebagai pelaksana. Masyarakat hanya dibebani swadaya, sedangkan pelaksanaannya dikendalikan oleh Unit Pengelola atau bahkan BKM sendiri. PK BKM yang seharusnya sebagai pengarah pelaksanaan kegiatan justru menjadi pelaksana langsung di masyarakat. Sementara masyarakat penerima manfaat hanya tahu kegiatan terlaksana tanpa dilibatkan dalam kegiatan.

- Evaluasi keuangan Bulanan BKM.

Masyarakat setiap saat bisa mengetahui kondisi keuangan BKM melalui laporan bulanan. Secara teknis, Laporan Keuangan bulanan selalu dibuat dan dipasang di beberapa titik yang memungkinkan bisa diakses oleh publik. Hanya saja respon masyarakat tergolong rendah. Berdasarkan interview dari sejumlah BKM, belum pernah ada masyarakat yang menanggapi laporan keuangan yang sudah dibuat oleh BKM. Ada beberapa hal yang menyebabkan respon masyarakat sangat rendah; Pertama, masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai fungsi dari informasi/ laporan yang disampaikan melalui beberapa media tersebut; kedua, masyarakat tidak memahami mengenai apa yang harus dilakukan apabila ada pemasangan laporan keuangan BKM. Ketiga, masyarakat apatis dalam merespon segala aktifitas BKM. Masyarakat tidak merasa berkepentingan terhadap hal ihwal yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perkotaan.

- Evaluasi kegiatan di tingkat KSM.

Untuk kegiatan Lingkungan dan Sosial, Setelah kegiatan selesai, KSM

diharuskan melakukan evaluasi partisipatif di tingkat basis (RT/RW). Media ini merupakan forum pertanggungjawaban dan evaluasi KSM/ Panitia kepada masyarakat setempat sekaligus membuat rencana tindak lanjut. Realisasinya, sebagian KSM tidak melakukan pertanggung-jawaban di tingkat basis. Beberapa temuan lapang menunjukkan; pertama, KSM hanya memahami setelah pekerjaan selesai, tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan administrasi laporan untuk disampaikan kepada BKM atau konsultan. Kedua, KSM sekedar menjadi syarat administratif untuk mencairkan dana, pelaksana dan pengelola keuangannya dari BKM atau UP. Akibatnya KSM tidak merasa perlu mempertanggung-jawabkan kegiatan yang di atas namakan KSM tersebut.

- Evaluasi BLM pertermin di tingkat BKM

Laporan pertanggungjawaban BKM pertermin dilakukan setelah KSM yang mendapatkan alokasi dalam satu termin menyerahkan laporannya. Dalam forum ini mengundang perwakilan masyarakat di tingkat basis (RT/RW), KSM serta kelompok sasaran miskin dan perempuan. Tujuannya adalah menjadi media evaluasi dan pengendalian bersama masyarakat mengenai kegiatan yang telah didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan di setiap terminnya. Faktanya, tidak semua BKM menjalankan sesuai mekanisme. Bahkan dari semua sampel, tidak ada BKM yang melakukan rembug partisipatif yang merupakan Laporan pertanggungjawaban pertermin. Dengan demikian, pengendalian bertahap yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat tidak berjalan.

- Review partisipatif

Di akhir tahun, BKM bertanggung jawab untuk melakukan review partisipatif. Obyek review terdiri dari: pertama, Review kelembagaan, meliputi: penilaian terhadap kinerja kelembagaan BKM, termasuk keaktifan Pimpinan, agenda pertemuan rutin, kelengkapan struktur organisasi, Penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi; kedua, Review program, yang mencakup: evaluasi tentang pelaksanaan

program yang telah tertuang dalam rencana tahunan, Mutu produk yang dihasilkan (fisik maupun non fisik), manfaat khususnya terhadap KK miskin; Ketiga, review keuangan BKM, meliputi: Penilaian kinerja keuangan BKM, Penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan dana; dan Pelaksanaan audit keuangan BKM. (Dep. PU, 2010). Review partisipatif yang meliputi tiga komponen di atas dimaksudkan untuk menjadi media kendali masyarakat agar Pimpinan Kolektif BKM senantiasa berada dalam koridor yang benar sesuai dengan harapan masyarakat, baik dari kelembagaan, program maupun keuangannya.

- Evaluasi melalui forum RWT.

Forum partisipatif selanjutnya dalam rangka pengendalian program adalah Rembug Warga Tahunan (RWT). Pelaksanaan kegiatan di akhir tahun sebagai forum pertanggung-jawaban BKM kepada masyarakat sekaligus mengesahkan program-program yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Untuk menjamin legitimasi di masyarakat, peserta yang hadir minimal 2% dari jumlah penduduk dewasa di masing-masing Desa/Kelurahan. Agenda utama RWT adalah Pemaparan hasil review partisipatif oleh Koordinator Tim Review; Laporan Pertanggungjawaban BKM; Penyepakatan Program Kerja BKM; Penyepakatan Rencana Tahunan (Ren-Ta) tahun berikutnya; Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga jika diperlukan. Praktiknya, semua BKM melaksanakan Rembug Warga Tahunan hanya saja tingkat partisipasi masyarakat tidak semua memenuhi standart minimum (2%).

- Audit Independen masyarakat

Tahapan pengendalian partisipatif yang terakhir adalah audit independen dari masyarakat. Untuk itu, masyarakat Kelurahan yang peduli pada PNPM-MP dapat membentuk Kelompok pemantau independen PNPM-MP atau sejenisnya. Inisiatif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PNPM-MP harus diakomodasi oleh BKM dengan memberikan kemudahan

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hasil temuan dari audit independen bisa menyampaikan informasi temuannya kepada rembug-rembug warga kelurahan atau instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang ada. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Audit dan pemantauan independen secara umum belum berjalan. Masyarakat bahkan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai adanya mekanisme tersebut. Hal ini terjadi di semua lokasi PNPM Mandiri perkotaan baik Urban maupun Rural. Masyarakat juga belum menunjukkan partisipasinya mengenai pelaksanaan pemantauan independen. Konsultan juga membenarkan bahwa pada tahapan ini memang belum banyak tersampaikan di masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada partisipasi masyarakat terkait audit independent pada PNPM Mandiri Perkotaan.

Berdasarkan pemaparan dari tahapan serangkaian kegiatan saat monitoring dan evaluasi di atas, partisipasi masyarakat secara substansial hanya berjalan pada dua momentum kegiatan, yaitu kegiatan Review partisipatif dan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT). Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dari sejumlah BKM tidak didasarkan pada kesadaran masyarakat tentang kebutuhan melakukan review maupun RWT, melainkan lebih pada desakan dari tim Konsultan.

Kondisi ini relevan dengan konsep partisipasi Mikkelsen (2006:65) yang membagi menjadi dua: inisiatif sendiri dan bersifat memaksa. Partisipasi masyarakat pada saat rangkaian pengawasan partisipatif lebih dikarenakan keterpaksaan oleh oleh tim konsultan yang mendesak untuk melakukannya. Jika Teorinya Pretty digunakan memotret, maka partisipasi masyarakat masuk kategori *Participation by consultation*. Artinya masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi dengan pihak luar. Dalam hal ini, pihak luar yang dimaksud adalah konsultan yang mengawal perjalanan program. Partisipasi

masyarakat lebih banyak terjadi atas dorongan/tuntutan fasilitator, sehingga terkesan yang sesungguhnya membutuhkan proses tahapan partisipasi adalah fasilitator, bukan masyarakat. Ketika teorinya Keit Davis digunakan untuk memotret, maka masuk kategori partisipasi berupa tenaga dan pikiran (physical and psychological participation). Yaitu model partisipasi yang disamping memberikan sumbangan gagasan untuk kelangsungan program, juga aktif mengikuti aktifitas secara fisik dengan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan pada saat monitoring dan evaluasi.

Secara sistem, model partisipasi yang ingin dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan pendekatan teori Arstein adalah Pendelegasian kekuasaan (delegated power). Karena pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Masyarakat diberi kewenangan untuk melakukan sejumlah rangkaian kegiatan pada saat monitoring dan evaluasi, sementara Pemerintah hanya berperan memberikan dukungan baik teknis maupun non teknis. Meski demikian, praktiknya belum berjalan secara maksimal. Yang lebih tepat untuk memotret model partisipasi masyarakat pada saat melakukan serangkaian pengawasan adalah Mikkelsen, dimana masyarakat berpartisipasi atas dasar keterpaksaan, bukan atas dasar kesadaran sendiri akan kebutuhannya.

Dari pemaparan mengenai keterlibatan dalam penanggulangan korupsi pada PNPM Mandiri Perkotaan sejak perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi, model partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2
Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Korupsi di PNPM Mandiri Perkotaan

Pendekatan Teori	Kategori Partisipasi	Keterangan
1. Tahap Perencanaan.		
Mikkelsen	Bersifat Memaksa	Pemaksaan dari konsultan yg mendampingi.
R. Arstein	Partnership	Relasi Pemerintah dgn masyarakat sdh terjalin secara kemitraan untuk perencanaan pembangunan. Tidak didominasi oleh Pemerintah.
Keit Davis	- Psychological participation; - Physical and psychological participation; - Material participation.	- Partisipasi berupa tenaga - Partisipasi berupa tenaga dan pikiran. - Partisipasi berupa barang
2. Tahap Pelaksanaan.		
- Administratif		
Pretty	Passive Participation	KSM pelaksana tidak berpartisipasi mengerjakan administrasi. Yang mengerjakan BKM (UP) atau konsultan pendamping.
Arstein	Manipulation	
- Pekerjaan lapang.		
Keit Davis	- Physical Participation - Physical and psychological participation; - Material participation; - Money participation.	- Partisipasi berupa tenaga - Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran - Partisipasi berupa barang - Partisipasi berupa Uang
Pendekatan Teori	Kategori Partisipasi	Keterangan
3. Tahap Monitoring & Evaluasi		
Mikkelsen	partisipasi yang bersifat memaksa	Proses kegiatan pada saat monitoring & evaluasi hanya berjalan jika ada dorongan/paksaan dari konsultan pendamping.
Arstein	delegated power	Pemerintah mendelegasikan kekuasaan/kewenangan dalam melaksanakan monitoring kegiatan ke masyarakat
Pretty	Participation by consultation.	Dalam setiap tahapan dilakukan melalui konsultasi ke konsultan/fasilitator pendamping.
Keit Davis	physical and psychological participation.	Partisipasi berupa tenaga dan pikiran.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan model partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Korupsi pada PNM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tiga tahapan: *Pertama*, Partisipasi saat Perencanaan. Rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan meliputi: Sosialisasi awal dan Rembug Kesiapan Masyarakat; Refleksi Kemiskinan; Pemetaan Swadaya; Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat; Penyusunan PJM pronangkis. Model partisipasinya bersifat memaksa (Mikkelsen); Jika dilihat relasi antara masyarakat dengan Pemerintah masuk kategori *partnership participation* (Arstein). Bentuknya (Keit Davis) berupa pikiran (psychological participation); tenaga dan pikiran (physical and psychological participation); barang (material participation).

Kedua, Partisipasi saat Pelaksanaan. Secara administratif, termasuk kategori *Passive Participation* (Pretty). Bila dipotret berdasarkan tingkatan partisipasi menurut Arstein, berada pada tingkatan *manipulation*, artinya belum ada partisipasi masyarakat (nonparticipation). Sedangkan dari sisi pekerjaan, Bentuk partisipasinya (Keit Davis) berupa tenaga (physical Participation); tenaga dan pikiran (physical and psychological participation); barang (material participation); uang (money participation).

Ketiga, Partisipasi saat monitoring dan evaluasi Partisipatif. Terdapat serangkaian tahapan monitoring dan evaluasi internal sebagai upaya penanggulangan korupsi. Hanya saja, yang berjalan hanya pada dua kegiatan; Review Partisipatif; dan Rembug Warga Tahunan (RWT). Dari dua momentum partisipasi, jika dipotret dengan model partisipasinya Mikkelsen, masuk kategori partisipasi yang bersifat memaksa; jika dilihat dari relasinya dengan pemerintah, maka bisa dipotret menggunakan model partisipasi Arstein, dalam hal ini, tingkat partisipasinya mencapai tingkat *pendelegasian kekuasaan* (delegated power). Jika dilihat dari model Partisipasinya Pretty, maka partisipasi masyarakat masuk kategori *Participation by consultation*; Tetapi ketika teorinya Keit Davis

digunakan untuk memotret, maka masuk kategori partisipasi berupa tenaga dan pikiran (physical and psychological participation).

Meski demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proyek yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat cukup efektif dalam menanggulangi praktik-praktik korupsi. Masyarakat bahkan memberikan partisipasinya dalam berbagai bentuk sementara mereka tidak mendapatkan imbalan secara finansial dari proyek.

korupsi

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	canari.org Internet Source	2%
2	psflibrary.org Internet Source	2%
3	www.knowledgebank.irri.org Internet Source	1%
4	Kirsten Maclean. "Cultural Hybridity and the Environment", Springer Nature, 2015 Publication	1%
5	cherryboki.blogspot.com Internet Source	1%
6	cantikef.blogspot.com Internet Source	1%
7	digilib.its.ac.id Internet Source	1%
8	pasca.unand.ac.id Internet Source	1%
9	edepot.wur.nl	

Internet Source

1%

10

[dokumen.tips](#)

Internet Source

1%

11

Jules N Pretty. "Alternative Systems of Inquiry for a Sustainable Agriculture", IDS Bulletin, 04/1994

Publication

1%

12

[Submitted to Dublin City University](#)

Student Paper

<1%

13

[blogsarahsna.blogspot.co.id](#)

Internet Source

<1%

14

[www.p2kp.org](#)

Internet Source

<1%

15

[eprints.ums.ac.id](#)

Internet Source

<1%

16

[researcharchive.vuw.ac.nz](#)

Internet Source

<1%

17

[media.neliti.com](#)

Internet Source

<1%

18

[repository.ipb.ac.id](#)

Internet Source

<1%

19

[eprints.undip.ac.id](#)

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On